

**TWITTER DAN RUANG PUBLIK PEMERINTAHAN LOKAL
YANG PARTISIPATIF
(Telaah atas Komunikasi Politik Ridwan Kamil Melalui Twitter)**

***TWITTER AND PUBLIC SPHERE PARTICIPATORY
LOCAL GOVERNANCE
(Political Communication Analysis of Ridwan Kamil's Twitter)***

Muhammad Sufyan Abdurrahman

Pengajar Ilmu Komunikasi, Universitas Telkom, Bandung
Jl. Telekomunikasi, No. 1 Ters. Buah Batu. Bandung 40275
e-mail: sufyan@ypt.or.id

Diterima: 10 Nopember 2014 Direvisi: 19 Desember 2014 Disetujui: 29 Desember 2014

ABSTRACT

The new technology, just like the basic concept of technology since the pre-history age, it will provide easy access to mankind. The technology, apart from raising the media convergence and cyber community, also present new public sphere. Cyber room, in this case Twitter able to form a new public sphere. Nowadays, modern government using twitter as a representation media to communicate with the people as practiced by Ridwan Kamil. More than that, if carried out consistently, the utilization of the new public sphere can build a strong public participation, because of these relationships interaction between citizens and the leader getting closer, even not located. As Mcluhan arguments related to The Global Village Theory (Mcluhan, 1962), is the antithesis of the distance of time and reality limit world. Then, technology refracting that reality. In this research, through a qualitative approach researchers see the reality in constructive, perceive the phenomenon as seen by the senses. With these reasons, this research focused give an explanation of political communication through Twitter as a solution for participative community, communicative socialization, and open discussion space.

Keyword: *Twitter, Public Sphere, Participative Government*

ABSTRAK

Kehadiran teknologi baru, sebagaimana konsep dasar teknologi sejak zaman pra-sejarah, umumnya akan memberikan kemudahan akses bagi manusia. Teknologi, selain memunculkan konvergensi media dan komunitas maya. Ruang siber, dalam hal ini adalah Twitter mampu membentuk *new public sphere* (ruang perbincangan publik baru). Pemerintahan modern saat ini, sebagaimana dipraktikkan Ridwan Kamil sebagai Walikota Bandung, memanfaatkan Twitter sebagai media representasi untuk berkomunikasi dengan warga. Lebih jauh dari itu, jika dilakukan secara konsisten dapat membangun partisipasi publik yang kuat, karena hubungan interaksi antara warga negara dan pemimpinnya semakin dekat bahkan tidak berjarak. Sebagaimana argumentasi Marshall McLuhan terkait teori *The Global Village* (McLuhan, 1962), merupakan antitesis dunia realitas yang berjarak dan berbatas waktu. Teknologi kemudian membiaskan realitas itu. Dalam tulisan ini, melalui pendekatan kualitatif peneliti melihat realitas secara konstruktif, memaknai fenomena sebagaimana yang terlihat oleh indera. Dengan alasan

tersebut, penelitian ini difokuskan memberikan penjelasan tentang komunikasi politik melalui Twitter sebagai solusi partisipasi masyarakat, sosialisasi komunikatif, dan ruang diskusi yang terbuka.

Kata Kunci: *Twitter*, Ruang Publik, Pemerintahan Partisipatif

PENDAHULUAN

Kehadiran teknologi baru, yang ditopang disiplin ilmu teknologi informasi dan komunikasi, telah menciptakan berbagai perubahan terutama di bidang ilmu komunikasi dan ilmu politik. Media konvensional sebagai representasi primer ilmu komunikasi massa yang selama ini berpusat dalam dominasi kekuasaan dan modal tertentu, kini diimbangi kehadiran aplikasi teknologi baru seperti media sosial. Dalam hal ini Twitter.

Hal ini dirasa penting ketika terdapat beberapa permasalahan terkait komunikasi pemerintahan di Indonesia. *Pertama*, mayoritas kepala daerah menerapkan sekat birokrasi yang prosedural dan serba resmi, sehingga rakyat berjarak dengan pimpinannya. Kalaupun ada komunikasi, hanya mencakup elit tertentu dan kontennya terbatas manakala kelompok elit ini berhasil menyambungkan komunikasi dengan kepala tersebut.

Kedua, komunikasi pemerintahan di Indonesia masih belum meluas padahal Indonesia adalah negara dengan rentang geografi terbesar di dunia. Perbedaan jarak dan waktu demikian besar dan menganga, sehingga komunikasi kerap terkendala limit geografis ini. Dan terakhir, komunikasi pemerintahan di Indonesia belum merepresentasikan esensi komunikasi yakni menciptakan kesetaraan pemahaman (*to make common*) guna menciptakan kesamaan gerak, sehingga proses interaksi komunikasi masih bersifat permukaan dan belum menghasilkan implikasi konkrit sebagai solusi kehidupan.

Karenanya, kehadiran media baru ini selain cukup mampu mengatasi tiga permasalahan sebagai dasar penelitian ini, juga meneguhkan fenomena konvergensi media dengan teknologi informasi serta eksistensi teori *cybermedia* (media maya).

Bahkan, dalam tataran praktis, dari media siber ini akan tercipta pula *virtual community*, yakni masyarakat maya yang memiliki karakter interaksi hampir sama masyarakat nyata, hanya saja mereka tidak memiliki struktur dan pola komunikasi konvensional serta kontrol sangat kecil ke sesama anggota komunitas tersebut.

Virtual Community ini terbangun dari jaringan-jaringan sosial yang dibuat oleh komunitas itu sendiri, dengan ranah mereka antara lain media sosial, blog, dan aplikasi Internet lainnya. Menariknya, komunitas ini tidak bisa ditentukan demografi dan geografinya, sebab identitas mereka adalah hak privasi mereka sendiri. Mengacu kehadiran masyarakat “baru” ini, kajian ini hendak turut serta membangun studi baru yang disebut politik siber. Jika pada era lalu, aktivitas pemasaran politik dilakukan manual, maka hari ini kita semua menjadi saksi bahwa aktivitas politik telah banyak berkutat di ranah siber dalam membangun kesadaran politik bagi masyarakat.

Tulisan ini berupaya menjelaskan transformasi media komunikasi yang digunakan secara *mainstream*, Twitter, sebagai bentuk baru *public sphere*. Ini menggantikan komunikasi konvensional yang mengharapkan pertemuan secara tatap-muka. Adanya media baru, komunikasi yang

berlangsung tidak bergantung pada pertemuan fisik, melainkan bertransformasi dengan komunikasi maya (*cyber communication*), sehingga terjadi kesamaan pemahaman yang mendorong terjadinya pemberdayaan warga. Ridwan Kamil, dalam tulisan ini menjadi objek menarik untuk diulas lebih jauh atas keterlibatannya membentuk *new public sphere*. *Twitter*, menjadi *official tool* untuk menemui publik, tidak saja warga Bandung, tetapi di luar Bandung sekalipun, yang kemudian melahirkan komunikasi pemerintahan yang efektif sekaligus melahirkan pemerintahan partisipatif.

Konsep Teknologi

Bagi Martin Heidegger (1995), teknologi adalah alat. Karenanya, sebagai pijakan awal, teknologi bukanlah frase yang identik abad modern. Sudah sejak zaman prasejarah, manusia menggunakan teknologi seperti batu, kayu, atau logam, guna menjadi senjata, alat masak, alat transportasi, dan banyak lagi. Bahkan, jika kita telusuri literasi terkait, sebelum manusia prasejarah berkembang menuju spesies *homo erectus*/manusia yang berdiri tegak, terlebih dahulu mereka mengalami fase *homo habilis* yakni manusia yang menggunakan alat.

Merujuk pemikiran Neil Postman (1931-2003) dalam *Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in The Age of Show Business* (1985), teknologi dalam bentuk kemutakhiran apapun, tidak pernah mampu menggantikan nilai kemanusiaan. Menurut Postman, ada lima konsep terkait alat bantu manusia dalam bentuk teknologi.

Pertama, keberadaan teknologi baru dikatakan sebagai “pertukaran Faustian”. Ketika teknologi baru datang, maka ada keuntungan baru sekaligus komponen “lama” yang diambil dari kehidupan manusia. *Kedua*,

keuntungan yang didapat dari teknologi baru tidak pernah merata untuk seluruh populasi. Ada yang sangat diuntungkan, cukup untung, tapi juga yang dirugikan. *Ketiga*, teknologi mengubah cara berpikir kita tentang dunia. *Keempat*, perubahan yang disebabkan teknologi adalah perubahan yang bersifat ekologis. *Kelima*, teknologi dapat berkembang menjadi mitos tersendiri.

Selain Neil Postman, pemikiran soal konsep teknologi berasal dari Martin Heidegger (1889– 1976), filsuf Jerman, dalam salah satu karyanya berjudul *The Question Concerning Technology* (1954). Menurutnya, teknologi pada dasarnya melakukan pembingkai (*enframing; gestell*) terhadap pandangan kita akan dunia. Melalui teknologi, kita melihat alam sebagai sesuatu yang harus dikuasai dan dimanipulasi.

Jadi, sekali lagi melalui teknologi, manusia berhasil mengungkap sesuatu yang tadinya gelap jadi terang. Namun harus diakui, lanjutnya, ketersibakan ini sekaligus juga ketertutupan di sisi yang lain. Heidegger memberi contoh bagaimana keberadaan pembangkit listrik di Sungai Rhine telah mengubah fungsi dari sungai tersebut menjadi sebuah energi untuk kehidupan manusia. Akan tetapi, di sisi lain, sungai sebagai sebuah penampakan alam yang utuh menjadi tersembunyi di waktu yang sama.

Cyber Media dan Ruang Publik

Isitilah *cyber media* (media siber) pada dasarnya adalah istilah lama yang telah digunakan jauh sebelum Internet muncul. Semula, media siber digunakan untuk penyebutan pada kajian media konvensional yakni televisi dan radio. Seiring perubahan teknologi, maka *media siber* bergeser digunakan oleh Internet. Ronald Deibert

(1997), memberikan pendapatnya tentang *media siber* atau *hypermedia*:

... *Not only captures the convergence of discrete technologies, it also suggests the massive penetration and ubiquity of electronic media characteristic of the new communications environment ... the prefix "hyper" (meaning "over" or "above") emphasizes two central characteristics of that environment: the speed by which communications currently take place, and the intertextuality or interoperability of once-discrete media" (pp. 114-115).*

Meskipun ide-ide Deibert tentang *media siber* dirumuskan sebelum munculnya YouTube, Facebook dan Twitter, namun terlihat jelas bahwa perkembangan baru ini memperkuat kemudahan dan keluwesan pergerakan informasi digital antar berbagai media (*convergence concept*). Telepon genggam, *tweets*, surel, jaringan sosial, pesan teks, kamera digital, video *online*, surat kabar elektronik, dan televisi, dengan demikian membentuk lingkungan yang komunikatif.

Penjelasan ini sekaligus sebagai kritikan terhadap teoritis lama dalam rumusan media massa, pada saat dunia digital belum muncul media massa masih dikelompokkan dalam satu wilayah, yakni televisi, radio, surat kabar dan film. Namun sekarang, ketika era digital menguasai teknologi komunikasi, perumusan media massa era lama tidak lagi relevan digunakan untuk era konvergensi.

Munculnya ruang siber merupakan lompatan kualitatif setiap orang dalam hal pencarian, mengakses, memproduksi, dan bereaksi terhadap informasi yang diterima. Ruang Siber ini juga memperluas akses ke alat

komunikasi era digital melalui teknologi komunikasi. Kesimpulannya, ruang baru berbentuk teknologi media Siber ini lebih partisipatif. Sebab, sejak proses arus komunikasi di beberapa arah, dan karena peran produsen dan penerima informasi yang telah diacak, dan karena lebih banyak orang sekarang secara teoritis mampu membentuk sebuah pesan, maka kita dapat mengharapkan banyaknya wacana timbal balik dalam budaya masyarakat.

Sementara itu, seiring perubahan demokrasi di Indonesia, komunikasi politik terus menunjukkan peran pentingnya. Menurut Maswadi Rauf, "*Komunikasi Politik sebagai kegiatan politik merupakan penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain" (Maswadi Rauf, 1993: 32).* Karenanya, komunikasi politik setidaknya menyangkut tiga hal.

Pertama, motif politik itu sendiri. Yakni perbincangan terkait pertanyaan-pertanyaan kenapa seseorang harus masuk ke dunia politik, apa, dan bagaimana politik itu merefleksi kehidupan. *Kedua*, media atau juga disebut sebagai industri citra. *Ketiga*, berkaitan dengan konstituen, yakni siapa yang akan menerima pesan politis.

Realitas politik yang terjadi saat ini, menuntut para politisi perseorangan atau pun partai memiliki akses yang seluas-luasnya terhadap mekanisme industri citra. Yakni, industri berbasis komunikasi dan informasi yang akan memasarkan ide, gagasan, pemikiran dan tindakan politik. Politik dalam perspektif industri citra merupakan upaya mempengaruhi orang lain untuk mengubah atau mempertahankan suatu kekuasaan tertentu melalui pengemasan citra dan popularitas. Semakin dapat menampilkan citra

yang baik, maka peluang berkuasa semakin besar.

Hampir tak ada satu pun komponen-komponen sistem politik yang dapat meniadakan hubungan saling menguntungkan antara politisi dengan industri citra politik. Komponen seperti sosialisasi politik, rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan aturan, dan pelaksanaan aturan dibentuk dan dilaksanakan melalui akses terhadap industri citra. Di antara industri citra yang sangat menonjol dewasa ini adalah industri media, baik media massa maupun media sosial.

Kekuatan utama media yang tidak bisa dibantah pada era informasi saat ini yakni kekuatan mengkonstruksi realitas. Artinya, kekuatan dalam mengemas berbagai isu yang ada, sehingga menonjol ke permukaan dan akhirnya menjadi perbincangan publik yang menarik. Banyak orang ataupun institusi sosial dan politik yang berkepentingan dengan media.

Mereka berupaya memiliki akses untuk masuk dan mempengaruhi media, dengan asumsi penguasaan atas media akan menjadi pintu masuk dalam pengemasan dan penguasaan opini publik. Selanjutnya, dengan menguasai opini publik diharapkan akan mudah mengarahkan kecenderungan pilihan khalayak sesuai dengan yang diharapkan. Opini dalam perspektif komunikasi dipandang sebagai respon aktif terhadap stimulus yakni respon yang dikonstruksi melalui interpretasi pribadi yang berkembang dari *image* dan menyumbang *image*. Oleh karenanya, opini merupakan respons yang dikonstruksi, maka sangat strategis jika politisi yang bertarung memiliki perhatian pada politik pengemasan opini. Paling tidak, ada tiga komponen utama di dalam sebuah opini.

Pertama, credulity atau soal percaya dan tidak terhadap sesuatu. Dengan pemasaran yang baik, khalayak akan digiring mempercayai apa yang menjadi konsep dan tawaran kandidat. Semakin besar kepercayaan, maka opini yang berkembang akan semakin positif.

Kedua, di dalam opini juga terkandung nilai berbentuk nilai-nilai kesejahteraan (*welfare values*) dan nilai-nilai deferensi (*deference value*). Nilai-nilai kesejahteraan semisal kemakmuran, keterampilan, dan *enlightenment*. Sementara nilai-nilai deferensi semisal penanaman respek, reputasi bagi *moral rectitude*, perhatian dan popularitas serta kekuasaan. Dengan memahami komponen-komponen nilai tersebut, kandidat seyogyanya memahami benar jika opini tidak bisa dibiarkan mengalir secara bebas, melainkan harus dikonstruksi. Tentunya dengan cara-cara yang elegan, (Dedi Kurnia SP, 2012: 42).

Ketiga, opini juga terdiri dari komponen ekspektasi. Yakni komponen yang berkaitan dengan unsur konatif. Ini merupakan aspek dari *image* pribadi dan proses-proses interpretif yang terkadang disamakan oleh para psikolog sebagai impuls, keinginan (*volition*), dan usaha keras. Kesadaran untuk mengemas opini publik adalah kesadaran menyelaraskan keinginan dan usaha keras pencapaian tipe ideal sebuah tatanan dengan tipe ideal yang diharapkan khalayak pemilih. Semakin luas arsiran wilayah harapan antara kandidat dengan pemilih, maka akan semakin besar pula peluang kandidat untuk memenangi pertarungan citra, (Gesara Rina, 2011: 73).

Penciptaan citra ini sangat terkait dengan konstruksi sosial. Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckman, konstruksi sosial atas realitas terjadi secara simultan

melalui prosesi tiga tahap yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Ketiga proses tersebut terjadi dan melebur di antara individu-individu dalam masyarakat dan terjadi secara alamiah melalui bahasa dalam kehidupan sehari-hari pada sebuah komunitas primer dan semi-sekunder. Tentu, tidak serta merta media siber mampu merekayasa realitas secara tunggal. Tetap membutuhkan media pendamping yakni media massa yang masih bersifat konvensional (*televisi, radio dan koran*).

Dengan demikian, teori konstruksi sosial atas realitas Peter L. Berger dan Thomas Luckman menekankan bahwa tanpa media massa, distribusi pesan dalam konstruksi sosial atas realitas berlangsung lambat. Kemudian waktu yang ditempuh untuk membangun opini demi terciptanya realitas media semakin lama, bersifat spasial (*terputus-putus*), dan berlangsung secara hierarkis-vertikal (*terstruktur*).

Media massa sebagai agen simulasi sebuah realitas sosial mampu memperkaya keadaan nyata menjadi lebih nyata. Meminjam tesis Jean Baudrillard, pakar komunikasi Prancis, menyatakan bahwa kemampuan media massa dalam memproduksi sebuah realitas buatan menjadi realitas yang sebenarnya, bahkan meski tidak memiliki rujukan sama sekali dalam kehidupan kita.

Dalam penciptaan citra realitas, media massa mampu menciptakan hegemoni opini publik. Dengan kemampuan membangun opini publik inilah yang memudahkan alur para marketing politik dalam merangkai dinasti elektabilitas. Berbagai isu akan ditampilkan kepada khalayak dan khalayaklah yang berhak memilih, apakah isu tersebut sebagai cerminan pribadi calon atau bukan. Citra realitas politik yang demikian

akan mendapat respon adanya ruang demokrasi, menggunakan istilah hegemoni yang berarti semua keputusan ditangan rakyat, sedang cara dominasi lebih dekat pada keputusan yang dipaksakan penguasa.

Komunikasi Politik

Komunikasi politik, telah menjadi bagian dari disiplin ilmu sejak lama dan telah tercantum dalam kurikulum ilmu sosial, baik dalam kajian ilmu komunikasi maupun dalam kajian ilmu politik. Tidak hanya mahasiswa sebagai peminat, para aktor politik (*political figure*) pun terlibat dalam interaksi komunikasi politik seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pengamat politik dan para aktivis politik lainnya.

Di Indonesia, saat ini momen-momen aktifitas politik begitu banyak terjadi dan melibatkan masyarakat secara luas seperti melalui pemilihan umum secara langsung anggota parlemen (Pemilu), pemilihan langsung Presiden (Pilpres) dan pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada). Kegiatan politik tersebut melahirkan berbagai bentuk komunikasi politik. Oleh karenanya kajian komunikasi politik ini akan terus berkembang seiring dengan berjalannya proses pendewasaan politik di Indonesia.

“Komunikasi Politik sebagai kegiatan politik merupakan penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain”
(Maswadi Rauf, 1993: 32)

Komunikasi Politik bertujuan utama untuk membentuk opini publik. Opini dalam perspektif komunikasi dipandang sebagai respon aktif terhadap stimulus yakni respon yang dikonstruksi melalui interpretasi pribadi yang berkembang dari image dan

menyumbang image. Oleh karena opini merupakan respons yang dikonstruksi, maka sangat strategis jika politisi yang bertarung memiliki perhatian pada politik pengemasan opini.

Pemerintahan Partisipatif

Partisipasi publik atau partisipasi masyarakat dalam seluruh kebijakan pemerintah (dari mulai penyiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi) merupakan hak masyarakat. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap hak pada masyarakat menimbulkan kewajiban pada pemerintah. Misalnya dalam penyusunan sebuah peraturan daerah (perda). Penerapan suatu perda harus tepat guna dan berhasil guna, tidak mengatur golongan orang tertentu saja, dengan mengabaikan kepentingan golongan lain yang lebih banyak. Sehingga dalam proses penyusunannya, para pihak yang berkepentingan dan memiliki kaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan yang hendak diambil harus dilibatkan.

Philipus M. Hadjon mengemukakan, konsep partisipasi masyarakat berkaitan dengan konsep keterbukaan. Dalam artian, tanpa keterbukaan pemerintahan tidak mungkin masyarakat dapat melakukan peranserta dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Selanjutnya dalam konsep demokrasi, asas keterbukaan atau partisipasi merupakan salah satu syarat minimum, sebagaimana dikemukakan oleh Burkens:

1. Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam pemilihan yang bebas dan rahasia;
2. Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk dipilih;

3. Setiap orang mempunyai hak-hak politik berupa hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul;
4. Badan perwakilan rakyat mempengaruhi pengambilan keputusan melalui sarana (*mede*) *beslissing-recht* (hak untuk ikut memutuskan dan atau melalui wewenang pengawas);
5. Asas keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan sifat keputusan yang terbuka;
6. Dihormatinya hak-hak kaum minoritas.

Asas keterbukaan sebagai salah satu syarat minimum dari demokrasi terungkap pula dalam pendapat Couwenberg dan Sri Soemantri Mertosoewignjo. Menurut S.W. Couwenberg, lima asas demokratis yang melandasi *rechtsstaat*, 2 (dua) diantaranya adalah asas pertanggungjawaban dan asas publik (*openbaarheidsbeginsel*), yang lainnya adalah asas hak-hak politik, asas mayoritas, dan asas perwakilan.

Senada dengan itu, Sri Soemantri mengemukakan bahwa ide demokrasi menjelmakan dirinya dalam lima hal, dua diantaranya adalah pemerintah harus bersikap terbuka (*openbaarheid van bestuur*) dan dimungkinkannya rakyat yang berkepentingan menyampaikan keluhannya mengenai tindakan-tindakan pejabat yang dianggap merugikan.

Tampak jelas bahwa dalam paham demokrasi terdapat asas keterbukaan, yang berkaitan dengan asas partisipasi masyarakat, sebagaimana pula dikemukakan oleh Franz Magnis-Suseno:

“Paham demokrasi atau kedaulatan rakyat mengandung makna, pemerintahan negara tetap di bawah kontrol masyarakat. Kontrol ini melalui 2 (dua) sarana: secara langsung melalui

pemilihan para wakil rakyat dan secara tidak langsung melalui keterbukaan (*publicity*) pengambilan keputusan. Pertama, pemilihan wakil rakyat berkonsekuensi pada adanya pertanggungjawaban. Karena, jika partai-partai mau terpilih kembali dalam pemilihan berikut, mereka tidak dapat begitu saja mempermainkan kepercayaan para pendukung mereka, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Kedua, keterbukaan pengambilan keputusan merupakan suatu keharusan. Karena pemerintah bertindak demi dan atas nama seluruh masyarakat, maka seluruh masyarakat berhak untuk mengetahui apa yang dilakukannya. Bukan saja berhak mengetahui, juga berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan”.

Selanjutnya Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere memaknai partisipasi sebagai berikut: bahwa pihak-pihak yang dipengaruhi oleh suatu keputusan yang ditetapkan *the stakeholders* (pihak yang mempunyai kepentingan) memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan, kritik dan mengambil bagian dalam pembuatan keputusan-keputusan pemerintahan. Pengertian partisipasi tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian partisipasi politik yang diberikan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam Miriam Budiardjo, yaitu bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Pengertian partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara terlibat dalam proses

pengambilan keputusan, dalam kepustakaan kebijakan publik di Belanda disebut *inspraak* atau partisipasi politik langsung. Ciri terpenting dari partisipasi politik langsung adalah tidak melalui proses perwakilan, melainkan warga negara berhubungan langsung dengan para pengambil keputusan.

Dikaitkan pendapat Herbert Mc Closky, bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan publik.

Tujuan dasar dari seluruh partisipasi ini adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan (*interest group*), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya kedalam suatu konsep.

Pandangan dan reaksi masyarakat itu, sebaliknya akan menolong pengambil keputusan untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang pasti dari berbagai faktor. Selain itu, partisipasi publik juga merupakan pemenuhan terhadap etika politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan. Agar bisa memberikan pemahaman lebih mudah soal pemerintahan partisipatif ini, sebagaimana dikemukakan Sherry Arnstein, serta Burns, Hambleton dan Hoggett, simak perbandingan di bawah ini:

Tabel 1. Tahap Pengembangan Tangga Partisipasi dan Pemberdayaan Rakyat

Tangga Partisipasi Rakyat (Sherry Arnstein)		Tangga Pemberdayaan Rakyat (Burns, Hambleton dan Hoggett)	
Kekuatan Rakyat	Kontrol Rakyat	Kontrol Rakyat	Interdependen
	Kekuataan Delegasi		Kontrol Kepercayaan
	Kemitraan		Kontrol Delegasi
Derajat Sosialisasi	Lobi	Partisipasi Rakyat	Kendali Kemitraan
	Konsultasi		Membatasi Desentralisasi Kekuasaan
	Informasi		Pengambilan keputusan efektif
Non Partisipasi	Terapi		Saran Orisinil
	Manipulasi		Masukan Berkualitas
			Non Partisipasi
Non Partisipasi		Informasi Lemah	
	Non Partisipasi	Saran dan Masukan <i>Nyinyir</i>	
		Non Partisipasi	Sensasi Rakyat

Sumber: *Role of Partnership in Modern Local Government*, Paper dari Yuri Navruzov, Aidan Rose and Wendy Shelley dalam Eighth Annual Conference of the Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (2000)

Twitter sebagai Media Publik

Twitter adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks terbatas 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan (*tweet*). Twitter didirikan pada bulan Maret 2006 oleh Jack Dorsey, dan situs jejaring sosialnya diluncurkan pada bulan Juli. Sejak diluncurkan, Twitter telah menjadi salah satu dari sepuluh situs yang paling sering dikunjungi di Internet, dan dijuluki dengan "pesan singkat dari Internet". Di Twitter, pengguna tidak terdaftar hanya membaca kicauan, sedangkan pengguna terdaftar bisa memosting kicauan melalui antarmuka situs web, pesan singkat (SMS), atau melalui berbagai aplikasi untuk perangkat seluler.

Twitter mengalami pertumbuhan yang pesat dan dengan cepat meraih popularitas di seluruh dunia. Hingga bulan Januari 2013, terdapat lebih dari 500 juta pengguna terdaftar di Twitter, 200 juta di antaranya adalah pengguna aktif. Lonjakan penggunaan Twitter

umumnya berlangsung saat terjadinya peristiwa-peristiwa populer. Pada awal 2013, pengguna Twitter mengirimkan lebih dari 340 juta kicauan per hari, dan Twitter menangani lebih dari 1,6 miliar permintaan pencarian per hari. Hal ini menyebabkan posisi Twitter naik ke peringkat kedua sebagai situs jejaring sosial yang paling sering dikunjungi di Dunia.

Tingginya popularitas Twitter menyebabkan layanan ini telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dalam berbagai aspek, misalnya sebagai sarana protes, kampanye politik, sarana pembelajaran, dan sebagai media komunikasi darurat. Twitter juga dihadapkan pada berbagai masalah dan kontroversi seperti masalah keamanan dan privasi pengguna, gugatan hukum, dan penyensoran. Twitter dimiliki dan dioperasikan oleh Twitter, Inc., yang berbasis di San Francisco, dengan kantor dan server tambahan terdapat di New York City, Boston, dan San Antonio.

Narasi di atas menunjukkan adanya transformasi ruang publik, disebut sebagai

ruang publik karena perbincangan yang menyangkut kepentingan bersama tertuang secara terbuka di sana. Agenda revolusi mesir adalah hal yang tampak fenomenal, kemudian revolusi *Green Movement* di Lebanon. Dan banyak hal revolusi virtual yang mencuat ke permukaan dunia. Dengan realitas tersebut, Ridwan Kamil memiliki kesadaran komunikatif yang cukup sensitif dengan turut serta berkecimpung di dalamnya.

METODOLOGI

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah Paradigma Konstruktivis. Secara Ontologis, Paradigma Konstruktivis bersifat relatif, di mana realitas dapat dipahami sebagai bentuk konstruksi mental yang diperoleh secara alami melalui kehidupan sosial atau pengalaman dan seringkali diperlukan diantara sejumlah individu.

Secara Epistemologis, paradigma konstruktivis bersifat transaksional dan subjektif. Peneliti dan objek penelitian diasumsikan terhubung secara interaktif sehingga temuan dari penelitian tersebut tercipta seiring pelaksanaan penelitian. Secara Metodologis, Paradigma konstruktivisme bersifat Hermeneutikal dan dialektikal. Dimana variabel dan sifat personal dari konstruksi sosial menyebabkan konstruksi individual.

Objek penelitian ini adalah akun media sosial Ridwan Kamil di Twitter @ridwankamil, Walikota Ridwan Kamil sendiri menjadi salah satu obyek penelitian. Pertimbangan tingginya nilai informasi dari obyek tersebut menjadi alasan utama peneliti memilihnya, selain faktor relevansi tujuan penelitian dengan *paper* ini. Penelitian dengan

objek media sosial adalah riset yang menarik karena sesuai *trend* yang berkembang.

Ridwan Kamil memiliki sejumlah akun media sosial, sekalipun yang paling aktif digunakan adalah Twitter. Pertama membuatnya 6 Oktober 2009 dengan akun @ridwankamil, akun ini sejak awal hingga sekarang dioperasikan sendiri (tanpa bantuan admin seperti sejumlah pemimpin politik lainnya). Ketika belum menjadi Walikota Bandung per 16 September 2013, jumlah pengikutnya sekitar 80.000-an, namun per 3 November 2014 telah mencapai 830.000-an, atau naik hampir 10x lipat semenjak resmi menjadi walikota dalam kurun satu tahun terakhir.

Rata-rata kicauannya ditanggapi puluhan, namun bisa ratusan jika menarik seperti saat berkicau soal rencana Bandung membuat Taman Jomblo, Taman Film, dan banyak hal lainnya. Demikian pula dengan jumlah yang me-*retweet* ataupun favorit, jumlahnya bisa ratusan hingga ribuan.

Di mata penulis, akun Twitter Ridwan Kamil menjadi kekuatan pembeda tersendiri dibandingkan akun pejabat publik daerah lain. Sebab, kicauannya bisa menggerakkan masyarakat dalam sejumlah program Pemkot Bandung seperti gerakan Biopori, taman tematik, Bis Damri gratis Senin-Kamis, Rebo Nyunda, Kamis Inggris, hingga terakhir Gerakan Pungut Sampah (GPS).

Jadi, masyarakat bisa bergerak mengikuti program tersebut tanpa perlu diikutkan dulu gerakan sosialisasi formal yang diinisiasi Pemkot Bandung --biasanya oleh Dinas Komunikasi Informatika. Dengan bahasa yang menggugah, kadang disertai visual desain grafis yang menarik. Ridwan Kamil mengajak secara persuasif pengikutnya. Tidak ada kesan memaksa, tidak ada citra

merasa punya jabatan, apalagi menggunakan pendekatan koersif atau penejangan hukuman bagi yang tidak ikut serta.

Sebaliknya dengan pendekatan seorang kawan atau seorang ayah yang memosisikan dekat dengan semua kalangan, sang walikota mencoba sebijak mungkin dalam merangkul semua kalangan. Tidak semuanya langsung setuju, bahkan yang menentang atau bernada *nyinyir*, kerap berdatangan dari warga. Namun karena Ridwan Kamil juga tergolong konsisten mengampanyekan sebuah program, perlahan dukungan pun jadi muncul.

Ilustrasi hal ini bisa dilihat dalam program Gerakan Biopori (dimulai Oktober 2013) yakni membuat lubang di tanah 30 cm guna mengurangi dampak banjir musiman. Dengan gaya ringan, mengayomi, sekaligus menonjolkan manfaat gerakan tersebut, Walikota Bandung mengajak seluruh lapisan masyarakat terlibat. Saat itu pula, tak semua paham dan mendukung gerakan. Namun tanpa lelah, nyaris tiap hari pula Walikota Bandung mengajak masyarakat terus terlibat, sehingga kian hari kian banyak yang setidaknya tertarik ikut serta.

Ditambah kemudian Gerakan Biopori ini berhasil menggandeng banyak sponsor yang menyediakan hadiah, sejumlah pencapaian pun diraih. Warga yang ikut membuat berjumlah banyak dan merata di seluruh Kota Bandung, apalagi Ridwan Kamil kerap mengapresiasi dengan *me-retweet* foto mereka yang tengah gotong royong membuat biopori. Puncaknya adalah tercipta Rekor MURI pada 29 Desember 2013, ketika dalam lima hari saja, berhasil dibuat sekitar 260.000 lubang biopori di seluruh Kota Bandung.

Respon sama ramainya tercipta ketika dibuat Taman Jomblo, sebutan bagi Taman Cikapayang, yang berada persis di bawah

flyover Pasupati di atas lahan seluas 25 x 25 meter persegi. Sebagai ruangan publik yang dulunya tidak terurus dan kumuh, maka sejak Februari 2014 dibuatkan sejumlah tempat duduk kapasitas seorang yang terpisah-pisah dan dicat warna-warni menarik mata.

Melihat bentuk kursi seperti itu, agar mudah diterima masyarakat, Ridwan Kamil dalam sebuah wawancara dengan media, spontan menyebut taman tersebut sebagai Taman Jomblo. Sontak, lini masa Twitter pun ramai menyebut taman tersebut. Bahkan, kicauan pertama sang walikota tentang Taman Jomblo di-*retweet* demikian banyak saat itu. Bahkan, arus media massa utama pun jadi tertarik mempublikasikan taman tersebut, seperti misalnya Liptan 6 SCTV yang secara khusus mewawancarai Ridwan Kamil di depan Taman Jomblo. Berkaca hal ini, *virtual community* yang terus memperbincangkan keberadaan taman tersebut, pada akhirnya berhasil menarik banyak media massa utama untuk ikut serta mereportasekan keberadaan taman ini.

Virtual community ini pula yang sering diajak Ridwan Kamil ikut memutuskan sebuah program. Misalnya ketika Telkomsel memberikan dana untuk bis pariwisata kota tingkat dua, dilakukan sayembara dan akhirnya muncul nama Bandros (Bandung Tour on Bus). Ketika program GPS hendak memunculkan ikon, sayembara serupa memunculkan nama Hero Bandung. Jadi, rakyat pun ikut ambil bagian memutuskan.

Selain menjadi alat penggerak massa seperti diuraikan di atas, dengan bermodalkan kata 140 karakter ataupun tautan video dan foto, Walikota Bandung juga tak sungkan berbagi sejumlah kisah, cerita, hingga gambaran respon masyarakat akan aktivitasnya saat berselancar di Twitter. Selain

itu, bagaimana warga merespon seluruh aktivitas tersebut –semisal mimik tiga ABG yang kusut setelah ketinggalan bis Damri gratis— juga ikut diperlihatkan, sehingga bukan hanya aksi, namun juga reaksi tergambaran lengkap di tulisan ini.

Selain Twitter, media sosial yang digunakannya adalah *Instagram*, dan *Facebook*. Di *Instagram*, walikota kerap mengunggah foto hasil sendiri menggunakan kamera kesayangannya, Canon EOS Mark II. Kualitas fotonya tak kalah baik dari fotografer profesional. Sese kali, foto dari humas Pemkot juga ditampilkan di akun tersebut. Jumlah foto yang diunggah hampir 1.300 buah dengan pengikut sekkira 130.000, di mana foto disukai hampir 2.000-3.000 pengikut dengan 150-an komentar.

Sementara di *Facebook*, Ridwan Kamil relatif kurang aktif karena pernah diretas di tahun 2009-an. Kini, dengan bantuan admin, medium *Facebook* yang resmi digunakan adalah akun *fans page* “Ridwan Kamil Untuk Bandung” yang fokus mengunggah kegiatan yang butuh narasi panjang disertai foto. Jumlah orang yang ikut grup ini sekitar 270.000 (*update* pada 3 November 2014). Respon di grup ini juga relatif ramai, namun Ridwan Kamil pribadi tidak merespon langsung komentar yang masuk seperti halnya di *Twitter* dan *Instagram*.

Satu kanal media sosial lain yang juga digunakannya adalah *ask.fm*, saluran tanya jawab berbentuk forum. Berbeda dengan tiga media sosial lainnya, sisi humanis Ridwan Kamil yang senang bercanda, terlihat jelas di *ask.fm*. Bahkan, jawaban yang diberikan sangat cair dan jauh dari kesan seorang walikota pada umumnya. Di medium ini, Ridwan Kamil menjawab langsung pertanyaan dari para pengikutnya. Meski awalnya banyak

yang kurang percaya, namun seiring konsistensi dan gaya jawabannya, perlahan orang percaya dan jadi membanjiri pertanyaan terhadap akun tersebut.

Metode penulisan menggunakan asumsi literatur, dengan pendekatan kualitatif. Dengan demikian, penelitian ini bersifat konseptual. Penulis melihat realitas melalui berbagai asumsi yang di dukung oleh kajian pustaka. Kemudian mengolah dengan pertanggungjawaban konsep ilmiah. Sebagai landasan berpikir olah data, penulis memerlukan teknik pengumpulan data sebagaimana berikut ini.

Wawancara menurut Mulyana (2004: 180), adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sesuai tujuan penelitian, maka wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan *in-dept interview* secara tidak terstruktur langsung kepada Ridwan Kamil dalam periode Agustus-September 2014.

Observasi partisipasi merupakan pengamatan langsung pada lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terhadap objek penelitian. Observasi dilakukan kepada penerbit buku dan media massa yang menjadi objek penelitian. Dari sana peneliti dapat mengetahui seperti apa arah kontruksi sosial yang dihendaki keduanya.

Teknik pengumpulan data lain yang peneliti gunakan adalah dengan dokumentasi, teknik ini dimaksudkan mengumpulkan data penelitian berdasarkan klipng koran di *Pikiran Rakyat* pada periode tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Ruang Publik ala Ridwan Kamil

Studi kasus yang dijelaskan dalam teks-teks di atas mengangkat beberapa masalah yang berhubungan antara Twitter, Ruang Publik, dan Pemerintahan Partisipatif. Pentingnya ruang media siber berada dalam cara-cara yang menggabungkan mobilitas, interaktivitas dan visibilitas. Kita sekarang dapat melihat teori media siber di mana aktivis *mobile* mengaktifkan konfigurasi secara interaktif antar-media yang terhubung antara media lama dan media baru. Sebuah teori ruang media siber adalah salah satu bagian penting munculnya media-YouTube, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya.

Sementara pada saat yang sama menekankan bahwa istilah "*media lama*" seperti televisi, world wide web, dan surat kabar adalah saluran penting yang ada di ruang media siber. "*New*" dan "*Old*" media karena itu terkunci dalam sebuah hubungan, tidak dapat terpisah karena keduanya adalah satu kesatuan sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Saling bergantung dan saling meneguhkan, juga saling melengkapi.

Mengacu hasil wawancara penulis kepada Ridwan Kamil, teks pesan dan interaksi digital berfungsi untuk menyalurkan informasi penting yang meningkatkan visibilitas berita di televisi. Perpaduan gerakan gambar antara ponsel, layar komputer, dan layar televisi harus dihubungkan melalui media siber agar tersebar secara luas.

Sebaliknya, televisi masih cukup tangguh berdiri sendiri tanpa bantuan media siber. Poin pentingnya adalah belum saatnya merayakan munculnya media baru atau

meratapi media lama, *toh* pada faktanya media lama masih tetap mampu mandiri.

Ruang media siber adalah salah satu situs dari jaringan sosial, sebagaimana pendapat Bolter dan Grusin (1990):

Media memiliki hak, tetapi hak agen yang ... dibatasi ... ia adalah agen agen perubahan budaya melalui interaksi material formal, dan logika ekonomi yang menyelinap masuk dan keluar dari jangkauan individu dan kelompok sosial.

Dalam hal ini, hubungan antara praktik komunikasi dan situasi di wilayah yang membutuhkan eksplorasi lebih lanjut dan memerlukan banyak teori. Salah satu cara untuk memulai penelitian hal itu adalah dengan membedakan antara informasi dan mobilisasi. "*Revolusi Twitter*" yang berkembang di beberapa negara seperti Indonesia. Siber sebagai fasilitator pertukaran informasi lintas batas, tetapi sejauh mana efektifitas ruang siber dalam mengorganisir massa.

Dapat dikatakan bahwa sifat media "*publik*" tersebut dan visibilitas tinggi mereka membuat mereka sempurna untuk menggabungkan massa (*mass diffusion*), sementara informasi pada saat yang sama membuat mereka tidak efektif dalam menyelenggarakan operasi *clandestin* dalam konteks *volatile*. Ruang Media siber memberikan ruang alternatif untuk pengendalian aktifitas sosial (Kraidy, 2006). Proses teknologi memungkinkan untuk mengambil tempat, di mana aktor lain diabaikan setelah ada aktor lain yang memainkan peran lain.

Analisa Kontruksi Sosial dan Pemerintahan Partisipatif

Ridwan Kamil menyebutkan dalam wawancaranya kepada penulis, melalui kicauannya di Twitter, dia ingin menunjukkan adanya upaya mempengaruhi khalayak terkait persepsi kepemimpinannya di Kota Bandung.

Ridwan Kamil, dengan intensitas penggunaan Twitter, dapat membangun hubungan yang erat secara personal dengan warganya, terbukti adanya ribuan respon dari masyarakat maya yang terus mengawas serta mengkritisnya melalui Twitter. Tidak sedikit *guyonan* yang juga mendapat respon, dengan asumsi ini bahwa Ridwan Kamil dekat dengan masyarakat Bandung secara personal, tidak ada jarak dan bias terminologi.

Kondisi ini juga, sebagaimana penjelasan Peter L. Berger dan Thomas Luckman, menandakan gambaran tentang konstruksi social yang terjadi secara simultan melalui prosesi tiga tahap. *Pertama*, Eksternalisasi. *Kedua*, Objektivasi, dan *ketiga* adalah Internalisasi. Tiga proses tersebut terjadi dan melebur di antara individu-individu dalam masyarakat.

Tentu, tidak serta merta media siber mampu merekayasa realitas secara tunggal. Tetap membutuhkan media pendamping yakni media massa yang masih bersifat konvensional (*televisi, radio dan koran*). Realitas media konvensional hanya digunakan sebagai medium formal, semisal pemberitaan dan isu kebijakan yang bersifat formal. Tidak dengan Twitter, yang dikemas secara kedekatan emosional dan dekat dengan baasa sederhana masyarakat.

Dengan demikian, teori konstruksi sosial atas realitas Peter L. Berger dan Thomas Luckman belum memasukkan media massa sebagai variabel atau fenomena yang berpengaruh dalam konstruksi sosial atas realitas pada masa itu, kini perubahan telah

terjadi dengan kecepatan maksimal dan hampir tidak ada kekuatan yang mampu menghentikan, terutama kemajuan teknologi komunikasi yang berbasis massa.

Tanpa adanya media massa, distribusi pesan dalam konstruksi sosial atas realitas berlangsung lambat, waktu yang ditempuh untuk membangun opini demi terciptanya realitas media semakin lama, bersifat spasial (*terputus-putus*), dan berlangsung secara hierarkis-vertikal (*terstruktur*), di mana konstruksi sosial berlangsung dari pimpinan ke bawahannya, pimpinan kepada massanya, kyai kepada santrinya, guru kepada muridnya, orang tua kepada anaknya, dan sebagainya. Dalam konteks ini, bangunan konstruksi sosial membutuhkan lebih banyak *gate keeper*.

Hal lain yang ditekankan Ridwan Kamil adalah Twitter selain bisa mengatasi problematika eksisting komunikasi pemerintahan, juga dapat menciptakan konsep partisipasi masyarakat. Walikota Bandung menginginkan warganya aktif terlibat dalam pelbagai program pemerintah, sehingga seluruh informasi yang semula eksklusif oleh kepala daerah sebelumnya, sengaja dibuka guna melahirkan peranserta aktif.

Terlebih, Ridwan Kamil menyadari bahwa rakyat pada dasarnya mempunyai hak yang sama dalam pemilihan yang bebas dan rahasia; mempunyai hak untuk dipilih; mempunyai hak-hak politik berupa hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul; dan mempunyai asas keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan sifat keputusan yang terbuka.

Mengacu analisa Franz Magnis-Suseno dalam *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, yang selaras dengan hasil wawancara Ridwan Kamil kepada penulis, bahwa saluran Twitter juga

diproeksikannya sebagai sebuah keterbukaan (*publicity*) pengambilan keputusan. Keterbukaan pengambilan keputusan dilakukan karena Pemkot Bandung bertindak demi dan atas nama seluruh masyarakat, maka seluruh masyarakat berhak mengetahui apa yang dilakukan. Bahkan, sambung Ridwan Kamil, bukan saja berhak mengetahui, juga berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan --seperti saat dilakukan sejumlah sayembara penamaan program kota, seperti Bandros, Hero Bandung, dst.

Karenanya, jika diklasifikasikan dalam teori terkait komunikasi partisipatif (dari Sherry Arnstein maupun Burns, Hambleton, dan Hoggett), Ridwan Kamil sudah termasuk berhasil mencapai tahapan tangga partisipasi maupun tangga pemberdayaan rakyat. Tahapan awal yakni masyarakat ikut serta mengontrol sudah tergambarkan dengan saran, kritik, hingga respon atas sebuah kebijakan. Selanjutnya, partisipasi (dengan segala derajat kegiatannya) pun muncul berkat aktivitas kicauan pada @ridwankamil, sehingga bentuk pemerintahan partisipatif telah terjadi cukup efektif di Kota Bandung.

KESIMPULAN

Studi kasus Ridwan Kamil di atas menjelaskan hubungan antara manfaat teknologi ruang Siber terhadap publik keseluruhan. Bahwa teknologi sebagai *techne*, telah menunjang eksistensi seorang *homo habilis* yang tengah menjadi pemimpin politik, sehingga tercipta kondisi "*extension of men*". Teknologi ini memungkinkan keaktifan di media sosial (yang dikelola sendiri secara langsung oleh Ridwan Kamil), memunculkan hadirnya ruang lompatan kualitatif setiap orang dalam pencarian, mengakses,

memproduksi, dan bereaksi terhadap informasi yang diterima.

Walikota Bandung periode 2013 s.d 2017 berhasil menciptakan respon aktif terhadap stimulus, yakni respon yang dikonstruksi melalui interpretasi pribadi yang berkembang dari *image* dan menyumbang *image*. Atau, dalam pendekatan lainnya terkait konstruksi opini, komunikasi di ruang siber miliknya mampu membangun *credulity*, menjanjikan nilai-nilai kesejahteraan (*welfare values*), menawarkan nilai-nilai deferensi (*deference value*), serta melahirkan ekspektasi. Dari kemampuan membangun keaktifan dan interaksi inilah, lahir kekuatan menciptakan opini sekaligus mengkonstruksi realitas. Yakni kekuatan mengemas berbagai isu yang ada, sehingga menonjol ke permukaan dan akhirnya menjadi perbincangan publik menarik.

Maka, kemampuan pengelolaan interaksi, opini, dan realitas inilah melahirkan komunikasi partisipatif. Yakni komunikasi yang proses arusnya dibangun pada banyak arah, peran produsen dan penerima informasi diacak, mampu membentuk sebuah pesan, sehingga terjadi wacana timbal balik dalam budaya sebuah masyarakat. Karena berlangsung berkelanjutan dan konsisten, dari komunikasi partisipatif ini lahirlah pemerintah partisipatif, dimana warga menjadi aktif terlibat dalam pelbagai program pemerintah. Bahkan bukan sekedar ikut serta dalam tahapan teori tangga partisipasi rakyat, tapi juga tangga pemberdayaan rakyat karena masyarakat Bandung tak sebatas mengontrol kekuasaan, namun sudah aktif dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah yang efektif, ikut membatasi desentralisasi kekuasaan, hingga aktif memberi masukan

yang orisinal/bebas kepentingan namun berkualitas

Ditunjang fakta bahwa Ridwan Kamil selalu mampu masuk radar media massa konvensional (televisi, radio, dan koran), maka distribusi pesan melalui Twitter ini menunjang lahirnya konstruksi realitas. Menunjang terciptanya proses membangun opini yang berjalan sangat cepat, terintegrasi, dan terstruktur. Ruang siber terbukti efektif sebagai fasilitator ide dan gagasan yang kolaboratif dan menggerakkan seluruh lapisan masyarakat, sehingga sifat proses yang ada membuat mereka sempurna untuk menggabungkan masa (*mass diffusion*).

Kesimpulannya, Ridwan Kamil dan pengikutnya di akun media sosial, terutama Twitter, akhirnya terlibat pola kolaboratif karena mereka meyakini bahwa teknologi efektif mengubah cara berpikir mereka tentang dunia. Sekaligus percaya bahwa perubahan tadi berjalan secara ekologis. Komunikasi politik yang sebelumnya serba formal, berjenjang, dan jauh dari masyarakat, diubah seketika dengan pola komunikasi yang datar, egaliter, mudah, dan partisipan. Pikiran kita tentang pejabat luruh berkat teknologi ruang Siber; Teknologi mengubah cara kita dalam menggunakan pikiran.

Ridwan Kamil menyadari, melalui teknologi, bisa dilakukan *enframing; gestell* (pembingkai) terhadap pandangan kita terhadap dunia. Melalui teknologi, pemimpin politik di Kota Bandung ini melihat alam sebagai sesuatu yang harus dikuasai dan dimanipulasi, sehingga dengan sendirinya terjadi pembingkai media —sebagaimana ditegaskan Robert Entman.

Untuk perubahan ekologis, situasi ini terjadi manakala wajah keseluruhan Pemerintah Kota Bandung dan pemimpin

politik yang menjalankannya berubah menjadi tampilan yang cerdas, inovatif, dan partisipatif. Jadi, membayangkan Pemerintah Kota Bandung hari ini membayangkan pemerintah dengan banyak terobosan, bukan lagi pemerintah otoriter yang koruptif turun temurun.

Untuk itulah, mereka yang menginginkan pencapaian serupa Ridwan Kamil, Walikota Bandung periode 2013-2018, maka teknologi ruang Siber sebagai medium komunikasi politik dalam membangun opini, konstruksi realitas, sekaligus partisipasi publik, bisa turut menjadikannya sebagai solusi utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, V.L. (1995). *Power in Trade Union*. London: Longman
- Bolter, J. D. & Grusin. (1999). *Remediation: Understanding new media*, Cambridge, MA: MIT Press.
- Castells, Manuel. (2001). *The Rise of The Network Society*. Oxford: Blackwell
- Fanz Magnis-Suseno. (1987). *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, PT. Gramedia, Jakarta
- Geertz, Clifford. (1992). *Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius
- Heidegger, Martin. (1982). *The Question Concerning Technology*. HarperCollins.
- Hidayat, Taufik. (2007). *Ilmu Komunikasi dan Sistem Politik*. Jakarta: Qisthi Press
- Kraidy, M. M. (2009). *Reality Television and Arab Politics: Contention in Public Life*. Cambridge, UK and New York: Cambridge University Press.
- Kraydi, Marwan M. (2011). *Hipermedia Space and Global Communication*,

- Annenberg: the University of Pennsylvania Press
- Miriam Budiardjo, ed. (1981). *Partisipasi dan Partai Politik*, PT. Gramedia, Jakarta
- Marbun, B.N. (2007). *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nimo, Dan. (1993). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Postman, Neil. (1998). *Five Things We Need to Know About Technological Change*.
- Postman, Neil. (1986). *Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in The Age of Show Business*. Penguin Books.
- Putra, Dedi Kurnia Syah. (2012). *Media dan Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Reade, H.M. (1982). *Political Theory*. London: Sage Publishing.
- Sreberny-Mohammadi, A. & Mohammadi, A. (1994). *Small Media, Big Revolution: Communication, Culture, and the Iranian Revolution*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Yuri Navruzov, Aidan Rose, dan Wendy Shelley. (2000). *Role of Partnership in Modern Local Government*. Paper dalam Eighth Annual Conference of the Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe.